



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

**Sarilamak, Agustus 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renja DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan Urusan Pemberdayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Renja ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dalam penyajian Renja ini juga masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan perencanaan di masa mendatang. Demikianlah Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Agustus 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Drs. A.Zuhdi Perama.P.M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

**Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.



**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020 NOMOR 60



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	<i>i</i>
NASKAH PERATURAN BUPATI .....	<i>ii</i>
DAFTAR ISI .....	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL .....	<i>iv</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-5
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II     HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPDTAHUN              LALU .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .....	II-35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N .....	II-37
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	II-39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-53
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumateta Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota .....	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD/N .....	III-7
3.3. Program Dan Kegiatan .....	III-9
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-20
Tabel 2.2	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-35
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 .....	II-48
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Yang Ada Pada Setiap OPD .....	III-9
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat.....	III-10
Tabel 4.1.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 .....	IV-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Oktober 2019, dan akan selesai pada bulan Juli 2020.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur

Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2021 berpedoman pada Renstra DPMD/N Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja DPMD/N Tahun 2019 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2020 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2021, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2019. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2021 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2020.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi

dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2021 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan

rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD 2016-2021 masa periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir. Irfendi Arbi, MP - Ferizal Ridwan, S.Sos. RKPD ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi kehendak RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Seperti halnya RKPD 2021, maka Renja DPMD/N Tahun 2021 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016-2021. Renja DPMD/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4).
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 yang menjadi tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

##### **I. Pendahuluan.**

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2021, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman

dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

## **II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.**

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019-2020 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2020, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.**

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

## **IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.**

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang dibutuhkan.

## **V. Penutup.**

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2019 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2020 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2019, dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada Tahun 2019, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.681.213.- (Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi/ Jaringan SIPKD) di danai oleh APBD , Realisasi Keuangan Rp. 0 (%) ,Realisasi 0% . Kegiatan tidak terealisasi karena Jaringan SIPKD tersebut telah difasiltasi oleh Badan Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rp. 45.523.646 , yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. ....,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini tidak terlaksana karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan Rehab.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada Tahun 2019, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.970.000 dan realisai keuangan sebesar Rp. 4.647.000 (77,84%) serta realisasi fisik kegiatan mancapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat berupa materai 6000, 600 lembar dan Materai 3000, 300 lembar dan Cek 2 buku dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.320.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.536.100,- (94,30%) serta realisasi fisik kegiatan fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, yaitu Listrik 12 Bulan,

Telepon 12 Bulan dan Internet 12 Bulan, dengan capaian kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.950.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.475.000,- (83,90 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Komputer yaitu 1 Unit Bateray Laptop Toshiba dan 1 Buah Ekternal Hardisk , dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 306.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 292.333.000,- (95,40%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan yaitu berupa terbayarnya honorarium Pengguna Anggaran 12 bulan, Kuasa Pengguna Anggaran 11 bulan, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 bulan, Pembantu Pejabat Penatausaha Keuangan (Pembantu PPK) Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 bulan, Honor Bendahara Pengeluaran 12 bulan, Honor pembantu Bendahara 24 bulan, Honor Bendahara Barang 12 bulan, Honor Non PNS/PTT 14 bulan (Pegawai PTT 2 Orang, Honor Pegawai Honoror 130 bulan (Pegawai honorer 11 Orang), dengan capaian kinerja Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.700.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.700.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja yaitu : belanja jasa pemeliharaan komputer/Laptop 5 Kali, biaya jasa pemeliharaan mesin TIK 2 kali, biaya pemeliharaan pendingin ruangan 3 kali, instal 6 unit, service printer 8 kali, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.281.104,- dan realisasi keuangan sebesar

- Rp. 83.206.590.- (79,79%) serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.600.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.336.440,- (97,12%) serta relaisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan barang cetakan Yaitu Cetak Undangan Kegiatan TMMN 290 Buah, Cetak Lembaran Disposisi 10 Baliho 2 buah, Cetak Plakat, Cetak Stopmap 400 buah dan Cetak Laporan Pertanggungjawaban Nagari 42 Buah, dan penggandaan surat-surat, Blanko, SPJ dan bahan bimtek 248.000 lembar, dengan capaian kinerja terlaksananya palayanan administrasi perkantoran.
  8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
  9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.198.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.193.000,-(99,84%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
  10. Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang didanai oleh APBD dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 2.450.000.- dan realisasi sebesar Rp. 2.450.000.- (100%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan peralatan Rumah Tangga berupa Piring dan dan Sendok, dengan capaian kinerja yaitu tersedianya Peralatan Rumah Tangga.

11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.847.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.847.000.- (100%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah tersedianya kebutuhan penyediaan bahan logistik kantor berupa belanja Bendera, Marawa 1 paket, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
12. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.625.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.787.500.- (89,42%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan makan dan minum berupa Makan dan Minum Tamu serta Makan dan Minum Rapat 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 286.247.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 285.851.609,- (99,86%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan, dengan capaian kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran.

## **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 5 buah Kursi Rapat, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.575.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.485.949,- (88,47%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan sarana dan prasaran aparatur.



3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 648.000.- (99.69 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan berupa Laundry Karpet, Alas Meja dan Gorden, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan Gedung Kantor.

#### **C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000.- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Pakaiaann Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 40 Stel, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan disiplin aparaturnya.

#### **D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.772.491,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.853.000.- (92.06) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiosar realisasi kinerja SKPD 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD.
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.425.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.413.000,- (99.51%) serta realisasi keuangan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyusunan laporan keuangan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya 2 Laporan (12 bulan), dengan capaian kinerja

terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dani melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.598.938,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.181.000,-(81.34%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyusunan laporan akhir tahun yaitu berupa laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD.

#### **E. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.282.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.982.500,- (95.84%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini diantaranya adalah:

- ❖ Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
- ❖ Terfasilitasinya pelaksanaan KKN di Kabupaten Lima Puluh Kota pada 7 Kecamatan, 30 Nagari, dari 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan Jumlah mahasiswa yaitu 758 orang mahasiswa.
- ❖ Terlaksananya Lomba Kader Posyandu terintergrasi PAUD dan BKB (Bina Keluarga Balita) se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimenangkan oleh Posyandu Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Sebagai Juara I, Posyandu Nagari Taram Kecamatan Harau Juara II dan Posyandu Nagari Kurai Kecamatan Suliki Juara III.

Dengan Capaian kinerja berupa Meningkatnya Keberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.345.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.115.000,- (

80.24%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis atau Bimtek Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) sebanyak 40 kader Yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, Dengan capaian Kinerja meningkatnya wawasan KPMD Kader Pembangunan Masyarakat Desa. di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa yang didanai melalui APBD Dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.751.000.- Realisasi Keuangan Rp. 6.393.000.-serta realisasi Keuangan mencapai (50,14%) dan Realisasi Fisik 100%, Keluaran dari Kegiatan ini adalah Terbentuknya Posyantek 8 Posyantek di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebelumnya sebanyak 26 Posyantek menjadi 34 Posyantek dan Terfasilitasinya Masyarakat dalam memperoleh Informasi dalam penguasaan IPTEK serta meningkatnya kreativitas masyarakat dalam penguasaan Inovasi Teknologi dan berhasilnya Posyantek Nagari VII Koto Talago menjadi Juara I Posyantek Terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomo; 413.5-597-2019 tanggal 2019. Dengan capaian Kinerja yaitu meningkatnya minat dan motivasi masyarakat dalam menciptakan dan memanfaatkan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.289.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.041.600.- (80.68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan adalah:
  - ❖ Terlaksananya Lomba Inovasi TTG Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari Utusan dari Perguruan Tinggi, utusan Dari Sekolah Menengah Kejuruan dan Utusan dari Masyarakat. Lomba Inovasi TTG dimenangkan oleh Juara I dimenangkan oleh Limis Apendi dengan Inovasinya Yaitu Alat Kocor Tanaman utusan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Juara II an. Yulfian Azrial dengan Inovasinya Penyemprot Hama Luar Biasa berasal Nagari Simalanggang dan

Juara III an. Muslim dengan Inovasi yaitu Pembuatan Pelampung Pancing utusan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

- ❖ Ikut Serta Kabupaten Lima Puluh Kota pada Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera di Kabupaten Tanah Datar yang mengikut sertakan Ketiga Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten dan meraih Juara
- ❖ Dan Ikut sertanya Kabupaten Lima Puluh Kota menghadiri Undangan Gelar Teknologi Tepat Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Propinsi Bengkulu.

Dengan capaian kinerja meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

5. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.730.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.455.000,- (60.08%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Terhadap Pengurus/ Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari sebanyak 45 orang dari Jumlah LPM Yang Aktif yang ditargetkan yaitu 45 LPM dengan Capaian kinerja yaitu Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari. Le
6. Kegiatan Pembinaan PKK yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 446.865.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 436.251.848,- (97.62%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. adalah keluaran dari kegiatan adalah:
  - ❖ Terlaksananya Pembinaan PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota 93 Kelompok, Terlaksananya Rapat Koordinasi Tp. PKK dengan Organisasi Perangkat Daerah.
  - ❖ Terlaksananya Rapat Bulanan Tp. PKK Kabupaten dengan Tp. PKK Kecamatan.
  - ❖ Terlaksananya Bulan Bakti Dasawisma.

- ❖ Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak Tp.PKK tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- ❖ Ikut sertanya Tp.PKK Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rakornas PKK di Pusat.
- ❖ Terfasilitasinya TP. PKK Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti Jambore Tingkat Propinsi dan Nasional.
- ❖ Terfasilitasinya Tp. PKK Kabupaten dan Kecamatan dalam mengikuti Rangkaian acara Kesatuan Gerak PKK tingkat Propinsi dan Nasional.
- ❖ Terlaksananya Pembinaan Tp. PKK Kabupaten ke Kecamatan tentang 10 Program Pokok PKK.
- ❖ Terlaksananya Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Beprestasi Pokja I. Pokja II, Pokja III dan Pokja IV.
- ❖ Terlaksananya Kaji Banding bagi Tp.PKK ke Luar Propinsi.
- ❖ Terlaksananya Bimtek bagi Tp. PKK Kabupaten dan TP.PKK Kecamatan.
- ❖ Terlaksananya Kaji Banding bagi pengurus PKK ke Luar Dalam Propinsi.

Dengan capaian kinerja yaitu Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan.

7. Kegiatan Penyelenggaraan, Pembentukan, Pemekaran, Pengembangan dan yaitu Penghapusan Batas Nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.180.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.172.700,- (99.97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya:

- ❖ Permintaan Data Citra Satelit Ke Badan Informasi Geospasial.
- ❖ Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- ❖ Konsultasi ke Propinsi Sumatera Barat terkait Tatacara Penetapan Batas.

- ❖ Studi Banding ke Kabupaten Pasaman Barat terkait Tatacara Penetapan Batas.

Dengan capaian Kinerja yaitu Prosentase terfasiltasinya Pemerkan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

8. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan, Pembentukan, Pemekaran, Pengembangan Nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.695.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.695.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya:

- ❖ Sosialisasi Pemekaran Nagari dan Pemekaran Jorong.
- ❖ Rapat Tim Pemekaran nagari dan Rapat Tim Penetapan dan penegasan Batas Nagari.

Dengan capaian kinerja meningkatnya Keberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan.

9. Kegiatan Temu Wicara Lembaga Adat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.461.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.925.000,- (93.16%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya Temu Wicara Lembaga Adat dan terlaksananya Pembinaan Kelembaga Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja yaitu meningkatnya Wawasan Pemangku Adat.

#### **F. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**

1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.966.500.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.920.900,- ( 95,82%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelatihan Pengurus Bumrag/Bumdes 36 Bumrag (3 Orang/Bumrag), dengan Capaian kinerja berupa terbentuknya 50 Buah Bumrag di 50 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.455.000,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 23.756.000,- (57,30%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Rakor P3MD terkaitnya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan UU No.6 , Terlaksananya Mnev P3MD dan tersedianya Laporan Kegiatan P3MD , Terlaksananya Monev UEM-SP , KMN dan Produk Unggulan dengan. Dengan Capaian Kinerja Termonitoringnya Lembaga Ekonomi Pedesaan yang ada.

3. Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang didanai melalui APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 347.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 347.013.600,- (96,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dengan Keluaran dari Kegiatan antara lain;

❖ Hasil Pengukuran EpNag Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yaitu ;

1). Nagari Kurang Berkembambang 4 Nagari ( Manggilang,Tanjung Pauh, Koto Bangun dan Galugua)

2). Nagari Berkembang 62 Nagari ( Sit. Ld.Laweh, Sit. Gadang, Tungkar, Sit.Batua, Sit.Banda Dalam, Talang Maur, Jopang Manganti , Sungai Antuan, Talang Anau, Pandan Gadang, Baruah Gunung, Sungai Naning, Koto tengah, Banja Laweh. Maek, Suliki, Kurai, Sungai Rimbang, Limbanang, Anding, tanjung Bungo, Sungai talang, Kubang, Simpang Sugiran, Koto Tengah Batu Hampa, Durian Gadang , Sariak Laweh, Sungai Balantik, Suayan Pauh Sangik, Taeh Bukik, Taeh Baruah, Koto Tengah Simalanggang, Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Mungo, Andalaeh, Sungai Kamuyang, Tanjung Haro Sikuabu-Kabu, Ampalu, Halaban, Sitanang, Tanjung Gadang, Labuah Gunuang, Balai Panjang , Bukit Sikumpa, Batu Payuang, Tarantang, Koto Tuo, Batu Balang, Bukik Limbuku, Lubuak Batingkok, Gurun, Pilubang, Koto Alam, Pangkalan, Gunung Malintang, Tanjung Balik, Muaro Paiti, dan Sialang.

3). Nagari Cepat Berkembangan 13 Nagari (Mungka, Simpang Kapuak, Koto Tinggi, Guguak VIII Koto, Tujuh Koto Talago, Koto Baru Simalangga, Sarilamak, Tarantang, Solok Bio Bio, Taram, Koto Lamo, Lubuak Alai dan Durian Tinggi.

- ❖ Tiga Nagari terbaik Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Yaitu ;
  - 1) Nagari Taram Kecamatan Harau Juara I
  - 2) Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Juara II
  - 3) Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Juara III
- ❖ 1 Nagari terbaik I yaitu mewakili Kabupaten Lima Kota pada Lomba desa & Kelurahan Tingkat Propinsi diwakili oleh Nagari Taram.
- ❖ 1 Nagari terbaik I mewakili Sumatera Barat pada Lomba desa & Kelurahan Tingkat Regional yaitu nagari Taram .
- ❖ Penerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha oleh Presiden RI kepada Bupati Lima Puluh Kota yang telah berhasil dalam membina Pemerintahan Nagari .

Dengan Capaian Kinerja yaitu Meningkatnya Status Perekembangan Nagari.

#### **G. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.659.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.127.186,- (95,48%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah:
  - ❖ Terlaksananya Pembukaan dan Penutupan TMMN ke 106 dengan Lokasi Kegiatan yaitu di Nagari Situjuh Ladang laweh dan Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yang dilaksanakan Pembukaan tanggal 2 Oktober 2019 dan Penutupan pada tanggal 31 oktober 2019, dengan kegiatan yaitu Pembukaan Jalan Baru sepanjang 9 Km dari Nagari Situjuh Ladang Laweh menuju nagari Tungka.
  - ❖ Kegiatan Pencanaan Bulan Bakti Gotoroyong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan bersamaan dengan Pembukaan TMMN ke 106 di nagari Situjuh Ladang Laweh.



Dengan capaian kinerja berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Nagari.

2. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.795.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.795.000 (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terasilitasinya Penyelenggaraan Musrenbang Nagari 79 Nagari. Dengan Keluaran Kegiatan yaitu DURKP dan RKP dari 79 Nagari. Dengan capaian kinerja berupa Peningkatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Nagari. encanaan nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kegiatan Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.027.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.307.000,- (97.68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu:
  - ❖ Penetapan SK Bupati Lima Puluh Kota No. 341 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Jenis Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019.
    - 1) Nagari Swasembada : 20 Nagari
    - 2) Nagari Swakarya : 47 Nagari
    - 3) Nagari Swadaya : 12 Nagari
  - ❖ Data Papan dan Buku Monografi 79 Nagari.
  - ❖ Status Nagari Berdasarkan Pengukuran IDM Nagari tahun 2019 yaitu:
    - 1) Mandiri : 4 Nagari (Guguak VIII Koto, Sarilamak, Taram dan Situjuh Batua).
    - 2) Maju : 31 Nagari (Tanjuang Bungo, Suliki, Limbanang, VII Koto Talago, Piobang, Koto Tengah Simalanggang, Sikabu-Kabu Tj Aro Pd. Pjg, Mungo, Sungai Kamuyang, Batu Balang, Gurun, Koto Tuo, Tanjuang Balik, Gunuang Malintang, Pangkalan, Muaro Paiti, Labuah Gunuang, Batu Payuang, Balai Panjang, Situjuh Banda Dalam, Situjuh Gadang, Mungka, Talang Maua, Sungai Antuan,

Baruah Gunuang, Koto Tengah, Sariak Laweh, Koto Tengah Batu Hampa, Batu Hampa, Suayan).

- 3) Berkembang : 41 Nagari (Sungai Rimbang, Anding, Sungai Talang, Kubang, Taeh Bukit, Simalanggang, Sungai Baringi, Taeh Baruah, Andaleh, Solok Bio-Bio, Bukik Limbuku, Tarantang, Harau, Lubuak Batingkok, Pilubang, Manggilang, Koto Alam tanjung pauh, Koto Bangun, Lubuak alai, Durian Tinggi, Sialang, Pandan Gadang, Koto Tinggi, Talang Anau, Labuah, Ampalu. Bukit Sikumpa, Halaban. Tanjuang Gadang, Sitanang, Situjuah ladang laweh, Tungka Jopang Manganti, Simpang Kapuak, Maek, Bonja Laweh, Sungai naning, Swungai Balantiak, Pauh Sangik dan Durian Gadang).
- 4) Tertinggal : 3 Nagari ( Kurai, Koto Lamo & Galugua).
- 5) Sangat Tertinggal : -

Dengan Capaian Kinerja yaitu terdata Status Perkembangan Nagari.

4. Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengelolaan Prasarana Fasilitas Umum (KKP-FASUM) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.115.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 27.930.000,- (81.87%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan, Penilaian dan Rakor Kelompok Masyarakat Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-Fasum) di Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Keberlanjutan Pasca Program sebanyak, 124 BP-SPAMS tahun 2019. Penilaian KP-SPAM Tingkat Propinsi dilaksanakan pada Bulan November dimenangkan oleh KP-SPAM Pabantuan Nagari Taeh Bukit Kecamatan Payakumbuh di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Dan terlaksananya Rakor BP-SPAM se Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 16 Desember 2019 dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.368.700,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 90.435.700,- (91,94%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya 1. Rapat Koordinasi P3MD, 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P3MD , tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Tenaga Pendamping P3MD di Kabupaten Lima Puluh Kota dan terlaksananya Rapat Koordinasi bersama OPD terkait, Kecamatan dan dengan peserta dari pelaku-pelaku kegiatan dari desa/nagari dan Pendamping Profesional P3MD (TA,PD,PLD) dengan Capaian kinerja berupa, terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Nagari.

#### **H. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**

1. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.760.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.233.000,- (59,90%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang kawasan pedesaan yang diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta terdiri perwakilan unsur pemerintahan nagari .
2. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelola Keuangan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.641.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.899.457,- (97,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada 79 orang Operator nagari dan Admin 13 (Tiga Belas) Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2019 dengan Nara Sumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Dengan Capaian Kinerja yaitu meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari dibidang Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
3. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.077.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 208.018.900,- (99,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Badan

Permusyawatan Bamus dengan jumlah peserta yaitu sebanyak 79 orang Anggota Bamus dari 79 Nagari. Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dan pelatihan bagi aparatur dan stakeholder terkait dan diiringan dengan Benchmarking ke desa Taman Sari Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Barat dengan Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari.

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Wali Nagari didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 40.770.000.- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 39.650.000,- (97.25%) realisasi Fisik Kegiatan mencapai 100%. Keluaran Kegiatan yaitu Terlaksananya Rapat Koordinasi Wali Nagari Se Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian Kinerja Yaitu meningkatnya Pemahaman dan Wawasan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.690.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.490.000,- (83.13%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah 1)Terlaksananya Penilaian Lembaga Bamus Nagari Terbaik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Terbaik I yaitu Bamus Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Terbaik Ke II yaitu Bamus Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki dan Terbaik Ke III yaitu Bamus Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru . Dengan Capaian Kinerja yaitu meningkat Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

#### **I. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.052.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.531.000.- (90,68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari Kegiatan adalah Terevaluasinya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebanyak 79 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) dengan capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari.Keput

2. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp. 30.999.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.638.000,- serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah yaitu ditetapkan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebanyak 9 Keputusan dan Peraturan Bupati yaitu dengan Capaian kinerja berupa Tertibnya nagari dalam Penyusunan RAPB Nagari dan APB Nagari.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp. 33.658.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.269.000,- (63,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Nagari untuk 79 Nagari. dengan Capaian kinerja berupa Terfasilitasinya nagari dalam penyusunan pertanggungjawaban APB.2019 sebanyak 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan yang didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp. 30.860.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.535.0000,- (68,39%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa /Nagari melalui Sistim Pengelolaan Aset Desa(Sispades) yang dikuiti oleh masing-masing operator dari 13 Kecamatan dan 79 nagari serta Pendataan Aset Nagari untuk 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan capaian kinerja Terdatanya Aset dan Tertib Pengelolaan aset desa/nagari.

#### **J. Program Penataan Peraturan Perundangan**

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten dan Nagari yang didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp. 15.975.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.957.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah:
  - Penetapan Peraturan Bupati tentangn IKG Nagari tahun 2019.

- Data Produk hukum yang diterbitkan/diundangkan selama Tahun 2019 adalah sebanyak 79 Data.
- Rekapitulasi Data Peraturan Nagari tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala nagari sebanyak 79 Nagari.
- Rekap Data Rekomendasi Penyusunan Pernag SOTK Nagari sebanyak 79 Nagari.

### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada Tahun 2019 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu ;

Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja yang pertama yaitu jumlah Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan. Target yang ditetapkan adalah sebanyak **4** Bimtek/Pelatihan. Sedangkan realisasinya pada tahun 2019 adalah terlaksananya **10** Bimtek/Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari. Adapun Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- Bimtek Kawasan Perdesaan
- Bimtek/Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)
- Bimtek/Pelatihan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- Bimtek/Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Bimtek Bamus (Badan Musyawarah) Nagari.
- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pemutakhiran Data IDM.
- Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintahan Nagari dan Stakeholder Terkait.

- Rakor dan Pelatihan Bagi Seknag se-Kab. Lima Puluh Kota dan Stakeholder Terkait.
- Bimtek yang diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
- Bimtek Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)
- Bimtek Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

Indikator kedua yaitu persentase nagari yang menyampaikan dokumen APB Nagari dan LKPJ tepat waktu, dengan target kinerja 50%. Indikator Persentase Nagari yang menyampaikan dokumen APBNagari dan LKPJ Wali Nagari tepat waktu dihitung dari banyaknya Nagari yang menyampaikan dokumen APBNagari tahun 2019 dan LKPJ Wali Nagari tahun 2018 dalam rentang waktu Januari s/d April 2019. Semakin banyaknya Nagari yang menyusun dan menyampaikan Dokumen APBNagari dan LKPJ Wali Nagari sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka semakin baik kinerja DPMD/N dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.

Adapun target dari indikator tersebut adalah sebesar **50%**, yang artinya terdapat lebih kurang 39 Nagari ditargetkan menyampaikan dokumen APBNagari dan LKPJ Wali nagari dalam rentang waktu Januari s/d April 2019. Berdasarkan rekap data penyampaian laporan oleh Nagari, bahwa Indikator Persentase Nagari yang menyampaikan dokumen APBNagari dan LKPJ Wali Nagari tepat waktu terealisasi sebesar **55,70%**. Dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Dokumen APBNagari**

Dari 79 Nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota, Terdapat 43 Nagari yang menyampaikan Dokumen APBNagari Tahun 2019 dalam rentang waktu Januari s/d April 2019 yaitu sekitar 54,43%. Dokumen APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

### **2. Dokumen LKPJ Wali Nagari**

LKPJ merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari setiap tahunnya. Untuk

indikator persentase nagari yang menyampaikan Dokumen LKPJ Wali Nagari tepat waktu, data diambil dari penyampaian dokumen LKPJ Wali Nagari tahun 2018 yang disampaikan pada tahun 2019. Adapun jumlah dokumen LKPJ Wali Nagari yang diterima DPMDN dalam rentang waktu Januari s/d April adalah sebanyak 45 Dokumen yang artinya bahwa terdapat 45 Nagari yang menyampaikan Dokumen LKPJ sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Target yang ditetapkan untuk capaian kinerja Tahun 2019 adalah sebanyak **72 Nagari** yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan Nagari. Dari data evaluasi perkembangan Nagari Tahun 2018, terdapat **75 Nagari** yang memiliki nilai diatas 300. Pencapaian sebesar 104% ini, telah melebihi target yang ditetapkan. Rekapitulasi data Evaluasi Perkembangan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7. Nagari yang termasuk kurang berkembang atau dengan nilai dibawah 300 hanya pada 4 Nagari yaitu: Manggilang, Tanjung Pauah, Koto Bangun dan Galugua. Keempat Nagari ini berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian terdapat 62 Nagari yang termasuk kategori berkembang. Sedangkan nagari cepat berkembang sebanyak 13 Nagari. Dari total keseluruhan 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, 95% adalah Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300.

#### **2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai 96,68 %. Tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor . Tidak terlaksananya kegiatan tersebut yaitu karena tidak cukupnya dana yang tersedia untuk melaksanakan Rehab.



Adapun solusi dari permasalahan tersebut diatas dianggarkan pada tahun berikutnya.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu,terhadap pencapaian target dan realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 34,96 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 3,97 sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 29,97 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 27,56 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,75 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 21,75 %.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 8.06%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 22,75 %.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 40.24 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 4.35 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 61,24%.
6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 12,46 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,51%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 50.97 %.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,33%. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,87 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 63,34%.
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 59,85 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0.70 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 60,70 %.
9. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,25 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 1,19%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 46,91%.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 100 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,22%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 28 %.
11. Program Penataan Peraturan Perundangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 100%. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0.88%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 11,66%.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2019-2020 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan**  
**Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020		
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
X	Xx 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>16,38 %</b>		
X	Xx 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen dan surat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kelengkapan komputer yang diadakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB yang dibayar honorinya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata servis peralatan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak,Jumlah Lembar penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020				
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	Xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	Xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	xx	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	xx	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%
X	xx	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	9 unit kend roda 2 & 2 unit kend roda 4	2 unit kend roda 2	1 unit kend roda 4 dan 4 unit kend roda 2	0	0	0	2	18 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020		
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
X	xx 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Paket Pertelengkapan Gedung Kantor yang diadakan	32 paket		3 Pkt	2 Pkt	67 %	4 paket	7	31,25%
X	xx 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Laptop ,UPS,Fotocopy mini ,layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	26 paket	7 paket	2 paket	2 pkt	100%	4 paket	13	50%
X	xx 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	14 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	5	35,71
X	xx 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	3 paket	-	-			3 Paket	3	100%
X	xx 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	263 kgt	36 kgt	8 kgt	8 Kgt	100%	60 Kgt	104	39,54 %
X	xx 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Rutin/berkala Gedung Kantor	50 kgt	10 kgt	10 kgt	10 Kgt	100%	10 Kgt	30	60%
X	xx 02	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur	2 paket	0	0	0		1 Paket	1	50%
		Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	3 paket	0	1 paket	0		1 Paket	1	33,33%
X	xx 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>								
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	-	-			0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020				
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	41 stel	-	40 stel	40 stel		0	40 Stel	99%
			04	Pengadaan Pakaian Kopri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stel	-	-			0	0	0
X	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan	106 stel	-	-			0	0	0
X	xx	05		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan</b>								
X	xx	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	12 orang	3 orang	-			0	3 Orang	25%
			0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	32 orang	-	-			-		
			0	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	46 orang	-	-	-		-		
X	xx	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat perkembangan sistem pelaporan</b>								
X	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang, Laporan bulanan, laporan adm	55 dokumen	11 dokumen	10 dokumen	9 dokumen		7 dokumen	27 Dokumen	49 %
		06	02	Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	5 dokumen	1 dokumen	1	1	100	2	4 Dokumen	83.33 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020		
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Keuangan Semester	Semesteran			dokumen	dokumen		dokumen		
	06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 Dokumen	60%
		<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD</b>									
1		<b>URUSAN WAJIB</b>									
	15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>								
x	xx 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Anaka Sekolah(PMTAS) dan Fasilitasi KKN	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu		0	0	60%
X	xx 15 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt		0	0	100%
X	xx 15 03	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Posyantek yang terbentuk	37 posyantek	5 posyantek	7 posyantek			0	5	13,51%
		Pemberdayaan Tekonologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 kgt	-	3 kgt	3 kgt	100%	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020				
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	15	05	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.	79 LPM		49 LPM		0	49 LPM	62 %	
				Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan Kelompok PKK se-Kab. Lima Puluh Kota	93 klpk	93 klpk	93 klpk	50 klpk	93 klpk	93 Klpk	100%	
				Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran Pengembangan dan Penghapusan Batas Nagari	Persentase nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari	133 %	-	20%	20%-	20%	40%	30%	
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran pengembangan Nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari	127 %	-	20%		43%			
X	xx	15	15	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan anggota lembaga adat se-kab. Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	5 kgt	1 kgt	1 kgt	-	-	1 kgt	2 Kgt	40%
X	xx	15	16	Pemberdayaan Usaha Masyarakat dalam Peningkatan Peran Perempuan	-	93 klp	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020			
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	<b>16</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>										
X	xx	16 02	Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	95%	45%	80%	70%	87,50%	0%	115	24.21 %
X	xx	16 05	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Pedesaan	62 klpk	62 klpk	62 klpk	0-	0%	0	62 Klpk	100%
X	xx	16 06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	15 kgt	3 kgt	-			0	0	20%
X	xx	16 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan dan terlaksananya monev kegiatan P3MD di Nagari	6 kgt		2 kgt	2 Kgt	100%	2 kgt	4 Kgt	66.66%
				Jumlah Lembaga Ekonomi yang dimonitoring	115 klpk	109 klpk	109 klpk					
x	xx	16 15	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan	79 nagari	46 nagari	70 nagari	71 nagari	101 %	0	116	146%
	<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa</b>										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020				
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
x	Xx	17	01	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan kelompok Masyarakat Membangun Desa Jumlah Nagari yang akan melaksanakan TMMN dan BBGRM	80 nagari	79 nagari	80 nagari	2 nagari	2,5%	79 nagari	81 Nagari	101 %
x	Xx	17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persenatse nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	100%	30%	50%	3.8%	%	75%	75 %	75%-
x	Xx	17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa	100%	20%	-	-	-	20%	20%-	40%-
x	Xx	17	04	Monitoring dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat	100%	20%	45%			50%	50%	70%
x	Xx	17	05	Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	Persentase nagari dengan status berkembang dan maju Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada	100%	58%	91%	89.97%		94%	94%	94%
x	Xx	17	06	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM	114 klp	103 klpk	106 klpk			108 klpk	108	100%
		<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020		
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<b>Pemerintahan Desa</b>										
X	Xx 18 01	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah peserta Bimtek pengelola kawasan pedesaan	120 orang	-	30 orang	-	-	30 orang	60 Orang	50%
X	Xx 18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	723 orang	79 orang	184 orang	184 orang	100%	184 orang	447 Orang	61%
X	Xx 18 03	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	395 klpk	18%			158 orang	0	0
X	Xx 18 04	Rapat koordinasi dan rapat kerja wali nagari	Persentase tingkat kehadiran Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	100%	100%	100%			100%		0
X	Xx 18 09	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Bamus Nagari yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan Bamus Nagari dan terlaksananya Pilwanag	100%	8%	13%			33%		
	<b>19</b>	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Pedesaan Membangun Desa</b>									
X	Xx 19 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari tepat waktu di Kecamatan	79 nagari	79 nagari	79 nagari		79 nagari	79 Nagari	100%
X	Xx 19 02	Peningkatan Keterampilan Wanita	Jumlah Peningkatan Keterampilan Wanita	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx 19 03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	78 buah	7 buah	7 buah	7	100%	7 buah	21 26,92%
X	Xx 19 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 nagari	7 nagari	79 nagari	73 nagari		79 nagari	79 100%
X	Xx 19 05	Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan Nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100%	79 nagari	79 nagari 100%
	<b>24</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundangan</b>								
	24 01	Fasilitasi penyusunan produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib)	100%		15%			30%	0 15%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan di luar yang wajib)								

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

## Pencapaian Indikator Utama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70	72	74	75	72		75		
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	30%	50%	75%	100%	50%		100%		
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75%	80%	90%	95%	80%		95%		

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DPMD/N terdiri atas dua (2) sasaran yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dan meningkatnya keberdayaan masyarakat. Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari mempunyai dua (2) indikator yaitu: jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju, serta persentase nagari yang menetapkan RKP tepat waktu. Sedangkan meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator persentase badan usaha milik nagari yang aktif. Pada Tahun 2019, Kepala DPMD/N telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Sebanyak 50% ...

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N**

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
4. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
5. Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.
3. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
4. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.



Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada DPMN hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Nagari.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.
3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.

2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Nagari.
4. Belum Optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan Ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum Optimal penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari,
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja DPMD/N terlihat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				1.935.000	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				1.935.000	Rutin OPD
I.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	95%	1.480.765	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	95%	1.480.765	Rutin OPD
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah dokumen dan surat	12 bulan	10.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah dokumen dan surat	12 bulan	10.000	Rutin OPD
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	12 bulan	34.665	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	12 bulan	34.665	Rutin OPD
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah kelengkapan komputer yang diadakan	12 bulan	280.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Jumlah kelengkapan komputer yang diadakan operasional	12 bulan	280.000	Rutin OPD
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMD/N	Jumlah OB yang dibayar honorinya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 bulan	400.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMD/N	Jumlah OB yang dibayar honorinya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 bulan	400.000	Rutin OPD
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	DPMD/N	Rata-rata servis peralatan	12 bulan	10.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	DPMD/N	Rata-rata servis peralatan kantor	12 bulan	10.000	Rutin OPD

**Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N)**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	kerja Penyediaan alat tulis kantor	DPMD/N	kantor Jumlah ATK yang diadakan	12 bulan	85.000	kerja Penyediaan alat tulis kantor	DPMD/N	Jumlah ATK yang diadakan	12 bulan	85.000	Rutin OPD
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar penggandaan	12 bulan	75.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar penggandaan	12 bulan	75.000	Rutin OPD
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah alat listrik yang diadakan	12 bulan	8.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah alat listrik yang diadakan	12 bulan	8.000	Rutin OPD
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12 bulan	30.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12 bulan	30.000	Rutin OPD
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	3.600	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	3.600	Rutin OPD
11	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	12 bulan	12.000	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	12 bulan	12.000	Rutin OPD
12.	Penyediaan makanan dan minuman	DPMD/N	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12 bulan	120.000	Penyediaan makanan dan minuman	DPMD/N	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12 bulan	120.000	Rutin OPD
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMD/N	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	412.500	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMD/N	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	412.500	Rutin OPD
I.2	<b>Program</b>	DPMD/N	<b>Tingkat</b>	<b>88%</b>	<b>1.476.000</b>	<b>Program</b>	DPMD/N	<b>Tingkat</b>	<b>88%</b>	<b>1.476.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran</b>			<b>peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran</b>			
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	4 unit	450.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	4 unit	450.000	Rutin OPD
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Pertengkapan Gedung Kantor yang diadakan or	10 paket	450.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Pertengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 paket	450.000	Rutin OPD
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah Laptop ,UPS,Fotocopy mini ,layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	6 paket	76.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah Laptop ,UPS,Fotocopy mini ,layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	6 paket	76.000	Rutin OPD
4.	Pengadaan mebeleur	DPMD/N	Jumlah meubeleur yang diadakan	4 paket	49.600	Pengadaan mebeleur	—	Jumlah meubeleur yang diadakan	4 paket	49.600	Rutin OPD
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	12 bulan	280.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	12 bulan	280.000	Rutin OPD
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	12 bulan	30.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	12 bulan	30.000	Rutin OPD
7.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	95.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	95.000	Rutin OPD
8.	Pemeliharaan	DPMD/N	Jumlah	12 bulan	7.000	Pemeliharaan	DPMD/N	Jumlah	12 bulan	7.000	Rutin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	rutin/berkala mobileur		Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur			rutin/berkala mobileur		Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur			OPD
9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	DPMD/N	Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	1 paket	250.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	DPMD/N	Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	1 paket	250.000	Rutin OPD
1.3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas</b>	<b>35%</b>	<b>87.634</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>35%</b>	<b>87.634</b>	Rutin OPD
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMD/N	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	-	21.634	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMD/N	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	-	21.634	Rutin OPD
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DPMD/N	Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan	66 stel	66.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan	66 stel	66.000	Rutin OPD
1.4	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Tingkat kapasitas SDM aparatur BPM</b>	<b>67 %</b>	<b>100.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Tingkat kapasitas SDM aparatur BPM</b>	<b>67 %</b>	<b>100.000</b>	
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 orang	22.000	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 orang	22.000	Rutin OPD
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	32 orang	32.000				32 orang	32.000	Rutin OPD
3.	Bimbingan teknis		Jumlah ASN	46 orang	46.000	Bimbingan teknis		Jumlah ASN	46 orang	46.000	Rutin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	implementasi peraturan perundang-undangan		yang mengikuti Sosialisasi			implementasi peraturan perundang-undangan		yang mengikuti Sosialisasi			OPD
<b>I.5</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>20 %</b>	<b>48.250</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>20 %</b>	<b>48.250</b>	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen LKJIP , SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang ,Laporan bulanan , Laporan adm	10 dokumen	13.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen LKJIP , SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang , Laporan bulanan , Laporan adm	10 dokumen	13.000	Rutin OPD
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	17.500	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	17.500	Rutin OPD
3	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	17.750	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	17.750	Rutin OPD
<b>II.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>					<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>II.1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>		<b>Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>35 %</b>	<b>2.881.402</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>		<b>Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>35 %</b>	<b>2.881.402</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga & organisasi masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Anaka Sekolah (PMTAS) dan Fasilitasi KKN	549 Posyandu, 2713 Kader dan 450 siswa SD	287.812	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga & organisasi masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Anaka Sekolah (PMTAS) dan Fasilitasi KKN	549 Posyandu, 2713 Kader dan 450 siswa SD	287.812	IKD
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan KPMD	158 orang	153.065	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan KPMD	158 orang	153.065	Stunting
3.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Posyantek Yang Terbentuk	9 Posyantek	99.825	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Posyantek Yang Terbentuk	9 Posyantek	99.825	IKU OPD
4.	Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 Kegiatan	145.000	Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 Kegiatan	145.000	Priritas OPD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah LPM aktif	79 LPM	267.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah LPM aktif	79 LPM	267.000	Stunting
6.	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota	93 klpk	1.200.000	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota	93 klpk	1.200.000	
7.	Penyelenggaraan,	Kab. Lima	Persentase	53 %	215.500	Penyelenggaraan,	Kab. Lima	Persentase	53 %	215.500	Periorit



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari	Pulih Kota	nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari			Pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari	Pulih Kota	nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari			as Daerah
8.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Penyelenggaraan, pemekaran, pengembangan nagari	Kab. Lima Pulih Kota	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari	54 %	250.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Penyelenggaraan, pemekaran, pengembangan nagari	Kab. Lima Pulih Kota	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari	54 %	250.000	Priritas OPD
4.	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Pulih Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dan Bertambahnya Wawasan Anggota Lembaga Adat se Kab.Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	1 kegiatan	266.200	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Pulih Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dan Bertambahnya Wawasan Anggota Lembaga Adat se Kab.Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	1 kegiatan	266.200	Priritas OPD
II.2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>		<b>Persentase Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dilaksanakan</b>	<b>42 %</b>	<b>6.928.997</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>		<b>Persentase Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dilaksanakan</b>	<b>42 %</b>	<b>6.928.997</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	79 nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%	159.720	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	79 nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%	159.720	IKU OPD
3.	Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan		Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	62 kelompok	126.445	Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan		Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	62 kelompok	126.445	IKU OPD
4.	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi TTG).	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah gelar TTG yang diikuti	-	232.925	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi TTG).	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah gelar TTG yang diikuti	-	232.925	IKU OPD
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	1.Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan. 2. Jumlah Lembaga2 Ekonomi yang di monitoring dan dievaluasi	2 Rakor, 79 Nagari, 62 KMN, 11 UEM-SP, 42 Bumrag	155.727	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	1.Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan. 2. Jumlah Lembaga2 Ekonomi yang di monitoring dan dievaluasi	2 Rakor, 79 Nagari, 62 KMN, 11 UEM-SP, 42 Bumrag	155.727	Priritas OPD
6.	Perlombahan Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Cepat Berkembang	79 Nagari	95.000	Perlombahan Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Cepat Berkembang	79 Nagari	95.000	IKU OPD dan IKU KD
II.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	<b>95 %</b>	<b>1.334.590</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.</b>		<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	<b>95 %</b>	<b>1.334.590</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanaan BBGRM	79 Nagari	332.750	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanaan BBGRM -TMMN	79 Nagari	332.750	Rencana pelaksanaan TMMN Tahun 2021
2.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Jumlah Nagari Yang Menetapkan RKP Tepat waktu	100 %	165.000	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Jumlah Nagari Yang Menetapkan RKP Tepat waktu	100 %	165.000	IKU OPD
3.	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana desa	20%	385.990	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana desa	20%	385.990	Priritas OPD
3.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nagari yang pendanaanya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan	75%	200.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nagari yang pendanaanya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian	75%	200.000	Priritas OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI					kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI			
4.	Pemantapan Data Profil Nagari	Kab.Lima Puluh Kota	- Persentase Nagari dengan Status Berkembang dan Maju - Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada	96 %	165.850	Pemantapan Data Profil Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase Nagari dengan Status Berkembang dan Maju - Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada	96 %	165.850	IKU OPD dan IKU KD
5.	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM	108 klpk	85.000	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP- SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM	108 klpk	85.000	Priritas OPD
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>37%</b>	<b>835.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>37%</b>	<b>835.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kawasan Pedesaan	60 orang	85.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kawasan Pedesaan	60 orang	85.000	Priritas OPD
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	184 orang	90.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	184 orang	90.000	IKU OPD
3.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang Mengikuti Bimtek Manajemen Pemerintahan Nagari (Perangkat Nagari dan Bamus)	22 %	115.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang Mengikuti Bimtek Manajemen Pemerintahan Nagari (Perangkat Nagari dan Bamus)	22 %	115.000	IKU OPD
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Bamus Nagari yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan bamus Nagari dan terlaksananya Pilwanag	34 %	95.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Bamus Nagari yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan bamus Nagari dan terlaksananya Pilwanag	34 %	95.000	Priritas OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Rapat Koordinasi Wali Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tingkat kehadiran wali nagari dan sekretaris nagari	100%	450.000	Rapat Koordinasi Wali Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tingkat kehadiran wali nagari dan sekretaris nagari	100%	450.000	Prioritas OPD
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>		<b>Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan desa/nagari</b>	<b>34 %</b>	<b>735.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>		<b>Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan desa/nagari</b>	<b>34 %</b>	<b>735.000</b>	
1.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	79 Nagari	250.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	79 Nagari	250.000	IKU OPD
2.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	8 Buah	250.000	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	8 Buah	250.000	IKU OPD
3.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 Nagari	85.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 nagari	85.000	IKU OPD
4.	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang mengikuti	79 Nagari	150.000	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang mengikuti	79 nagari	150.000	IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nagari		Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi			Nagari	Kota	Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi			
	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN</b>		<b>Persentase terlaksananya penataan peraturan perundangan Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>20%</b>	<b>175.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN</b>		<b>Persentase terlaksananya penataan peraturan perundangan Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>20%</b>	<b>175.000</b>	
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten dan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan diluar yang wajib)	45%	175.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten dan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan diluar yang wajib)	45%	175.000	Prioritas OPD
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.200.000</b>					<b>4.200.000</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, disamping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Renja DPMD/N Tahun 2021 juga mengakomodir Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2021**

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>			
1.	Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Bimtek Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/Bumnag)		Kec. Harau & Kec. Payakumbuh
II	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>			
1.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Bimtek Kader Posyandu		Nagari Sariilamak Kec. Harau
2.	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bimtek Pengurus PKK		Nagari Sariilamak Kec. Harau





## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota**

##### **3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJM 2016-2021 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2021 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional,
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow* program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas Program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4 program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas kementerian desa:

1. Prukades.

Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.

Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa.

3. BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.

4. Sorga Desa

Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

### 3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, DPMD/N perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat proyeksi perkembangan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan sosial untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 6.54%
2. PDRB Harga Konstan	: 202.68 Triliun
3. PDRB Harga Berlaku	: 270.41 Triliun
4. PDRB Perkapita	: 48.59 Juta
5. Tingkat Inflasi (yoy)	: 5-6%
6. Tingkat investasi	: 60.30 Triliun
7. ICOR	: 3.18
8. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	: 72.56
9. Umur Harapan Hidup (UHH)	: 69,44 Tahun
10. Rata-rata Lama Sekolah	: 8,66 Tahun
11. Tingkat Pengangguran	: 5,60
12. Tingkat Kemiskinan	: 5,09

Disamping mengacu dan menpedomani proyeksi indikator kinerja ekonomi makro dan sosial daerah Sumatera Barat tersebut, dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari juga memperhatikan tujuan pembangunan menurut misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study RPJMD.

Telaahan urusan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan Pembangunan menurut Misi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 diantaranya:

1. Penguatan kelembagaan agama dan adat, merupakan tujuan kedua dari misi 1 yaitu meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pada Tahun 2021, ditargetkan terdapat 4 lembaga MUI dan 299 KAN sebagai lembaga adat dan agama yang melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna, yang merupakan tujuaj dari misi ketiga yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.
3. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal, yang merupakan tujuan dari misi keempat yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 terkait urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a) Prioritas 1: Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
- b) Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.

Adapun isu-isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah:

### **1. Ekonomi**

Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita renda, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi.

### **2. Keuangan Daerah**

Kinerja pemerintah dalam pencapaian PAD masih rendah, sinkronisasi antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil daerah.

### **3. Pertanian**

Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan.

### **4. Iklim investasi belum kondusif**

Rendanya Kapasitas Listrik, masalah pembebasan lahan, Regulasi pendukung belum optimal, aksesibilitas transportasi rendah, resiko bencana relatif tinggi.

### **5. Pendidikan**

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

### **6. Kesehatan**

Angka Kematian ibu dan Bayi masih tinggi.

### **7. Pemberdayaan Perempuan**

Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

### **8. Permasalahan Sosial**

Kepemilikan lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara, Pembangunan berbasis nagari dan kebencanaan.

### **9. Agama**

Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama.

### **10. Transportasi**

Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan transportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat tersebut.

#### **3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Karena RKPD 2020 merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, maka dalam penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih tersebut yaitu:

### ***Visi***

***“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis” Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Takwa”***

### ***Misi ;***

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota telah dirumuskan berbagai rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang atau agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Budaya;
- b. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan;
- c. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia;
- d. Pembangunan ekonomi dan kegiatan agribisnis terpadu;

- e. Pembangunan prasarana dan sarana;
- f. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N**

#### **3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPMDN Tahun 2016-2021**

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 112 Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2016-2021. Dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 2.

Berdasarkan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun 2016-2021, maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKP berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada RPJMD propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah propinsi dengan pembangunan nasional.
- b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2019 dan Kebijakan Propinsi dan RKP Kabupaten Lima Puluh Kota 2019. Sedangkan untuk telaahan Renstra DPMD/N tetap dilakukan terhadap Renstra DPMD/N 2016-2021, terutama dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada yaitu periode renstra yang sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Peraturan Bupati No 112 Tahun 2018 Tentang Renstra DPMD/N) Tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Misi ke 5 dari 6 Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2016-2021 yaitu; **”Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong”** dengan Tujuan yaitu ; **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari** , sasaran yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari* dengan Indikator Kinerja yaitu **Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Maju.**

### **3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2020**

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari.
4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka DPMD/N menetapkan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa/Nagari.
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan/Nagari.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.
4. Meningkatkan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka memacu Pembangunan Sosial Ekonomi di Nagari.
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di Nagari.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPMD/N Tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2008 serta Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPMD/N yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap SKPD**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>7. Penyediaan Barang Cetak Dan</li> </ol>

No	PROGRAM	KEGIATAN
		Pengandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan Makanan Dan Minuman 13. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Mebeleur 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan Dan Dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 3. Bimtek Peraturan Perundang-undangan.
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
<b>JML</b>	<b>5 Program</b>	<b>30 Kegiatan</b>

**Tabel 3.2**

**Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.</li> <li>2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat</li> <li>3. Penyelenggaran Desiminasi dan Informasi Bagi Masyarakat Desa .</li> <li>4. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna</li> <li>5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</li> <li>6. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)</li> <li>7. Penyelenggaraan Pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari,</li> <li>8. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan ,Pembentukan, pemerkaran,pengembangan nagari</li> <li>9. Temu wicara Adat se Kab.Lima Puluh Kota</li> </ol>
2.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa .</li> <li>2. Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro kecil dan menengah di Pedesaan</li> <li>3. Fasilitasi Kemitraan swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi TTG)</li> <li>4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>5. Evaluasi Perkembangan Nagari (Perlombaan Desa dan Kelurahan).</li> </ol>
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</li> <li>2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa</li> <li>3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa</li> </ol>

No	PROGRAM	KEGIATAN
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari 6. Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Umum (KPP-Fasum).
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan 3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 4. Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Wali Nagari 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Desa 4. Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan Nagari.
6.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari skala Kabupaten Lima Puluh Kota.
<b>JML</b>	<b>6 Program</b>	<b>30 Kegiatan</b>

**Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap OPD  
Sesuai Mendagri No. 90 Tahun 2017**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.1.		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.1.1			Penyusunan Renstra dan Renca Perangkat Daerah
1.1.2.			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.1.3.			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.1.4.			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pereangkat Daerah
1.2.		Administrasi Keuangan	
1.2.1.			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2.			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3.			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.2.4.			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.2.5.			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.6			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.2.7			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.2.8.			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.3.		Administrasi Umum	
1.3.1			Penyediaan jasa surat menyurat
1.3.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.3.3			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.3.4			Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.3.5			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.3.6			Penyediaan alat tulis kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.3.7			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.3.8			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.3.9			Penyediaan peralatan rumah tangga
1.3.10			Penyediaan bahan logistik kantor
1.3.11.			Penyediaan makanan dan minuman
1.3.12			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.3.13			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1.3.14			Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.3.15			Pengadaan peralatan gedung kantor

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.3.16			Pengadaan mebeleur
1.3.17			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
1.3.18			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.3.19			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.3.20			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.3.21			Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor
1.4		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.4.1			Pengadaan mesin/kartu absensi
1.4.2			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.4.3			Pengadaan pakaian KORPRI
1.4.4			Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
1.4.5			Pendidikan dan pelatihan formal
1.4.6			Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.4.7			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Program yang harus ada di Setiap OPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , 1 Program dengan 4 Kegiatan dengan 40 Sub Kegiatan.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan  
Urusan Pemerintahan Bidang Pembedayaan Masyarakat dan Desa  
Menurut Mendagri No. 90 Tahun 2019**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Penataan Desa		
1.1.		Penyelenggaraan Penataan Desa	
1.1.1			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
1.1.2			Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa		
2.1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	
2.1.1.			Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
3.1.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	
3.1.1..			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
3.1.2.			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3.1.3			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3.1.4.			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
3.1.5			Peningkatan Kapasitas Pemerinthan Desa dan BPD
3.1.6			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
3.1.7.			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
3.1.8			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
3.1.9			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
3.1.10.			Fasilitasi Pengkatan dan Pemberhentian Pearangkat Desa
3.1.11.			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		
4.1.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4.1.1			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
4.1.2			Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
4.1.3			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
4.1.4			Penyediaan Saranan dan Prasarana Kelembagaan
4.1.5			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.1.6			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



Sesuai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pembedayaan Masyarakat Desa mengaju pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada tahun 2021 melaksanakan 4 Program 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

**Tabel 3.3**  
**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2019)**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	Belum Tercapai		
	Jumlah PKK Aktif	Tercapai		



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja DPMD/N Tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan pada rancangan Awal Renja mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2008 serta Permendagri No. 21 Tahun 2011. Dengan keluarnya Pemendagri No.90 Tahun 2019 maka Rencana Kerja Akhir mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut . Dengan tahapan kegiatan pemetaan Program dan Kegiatan dari yang semula menggunakan Pemendagri N0. 13 Tahun 2006 ke Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 . Pada Permendagri Nomor 90 Tahunm 2019 Program terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan program , kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan untuk tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari melaksanakan yaitu (1) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (Empat) kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan yang harus ada pada setiap Perangkat Daerah dan 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dengan 20 (dua puluh ) Sub Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kinerja DPMDN dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 yang tadinya terdiri dua sasaran, Sasaran Pertama yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dengan indikator: (1) Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju; (2) persentase nagari yang menetapkan RKP tepat waktu. Sasaran kedua adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dengan telah diakukannya revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N maka Indikator Kinerja Utama DPMD/N juga mengalami revisi Sasaran Pertama tetap yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dengan indikator yaitu 1. Persentase nagari yang berkinerja Baik (Predikat A/ RKP, APBD/N dan LKPJ ( tepat waktu) dan Indikator ke 2 Persentase Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari. Dan

sasaran kedua juga tetap yaitu Meningkatnya Kualitas Lembaga ke Masyarakatan dengan Indikator Sasaran yaitu 1. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif dan Indikator ke 2 yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Secara terinci dapat dilihat tabel berikut;

**Tabel 4.1.**  
Rencana Target Kineja DPMDN (IKU DPMD/N)

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Persentase nagari yang berkinerja Baik (Predikat A/ RKP, APBD/N dan LKPJ ( tepat waktu)	75 %		IKU OPD
		Persentase Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari	94 %		IKU OPD
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga ke Masyarakatan	Masyarakat yang Persentase Lembaga Ekonomi aktif	90%		IKU OPD
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	87 %		

Selain Kinerja IKU DPMD/N sendiri DPMDN juga mengemban IKU Kepala Daerah sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah/

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	75		IKU KD

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima (periode akhir) Renstra 2016-2021. Kondisi akhir yang ditargetkan akan dicapai pada Tahun 2021 adalah sebanyak 75 nagari dari 79 nagari di Kab. Lima Puluh Kota berstatus berkembang dan maju. Indikator ini menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kepala Daerah

**Tabel 4.3**  
**Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket.
			2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	%	93	93	
	Jumlah PKK Aktif	Kelompok	93	93	

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat terdapat dua target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat yaitu: rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan jumlah PKK aktif. Target kinerja pada Tahun 2021 sebanyak 93% kelompok dalam pembinaan LPM. Sedangkan target untuk jumlah PKK yang aktif pada Tahun 2021 adalah sebanyak 93 kelompok.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan**  
**DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2021**

No.	Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2021		Tahun 2022	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	1	4.707.331.106	5,477.628.715,20	4 (40 Sub Kegiatan)	4.707.331.106	5,477.628.715,20	
2.	Urusan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	2.315.000.000	5.644.771.970	4 (20 Sub Kegiatan)	2.315.000.000	5.644.771.970	
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>7.022.331.106</b>	<b>11.122.403.685,20</b>	<b>8 (60 Sub Kegiatan)</b>	<b>7.022.331.106</b>	<b>11.122.403.685,20</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										7,022,331,106			0		
2	13	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>										4,707,331,106			0	
2	13	01	2.01	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										58,500,000			0
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	80 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,500,000
2	13	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah RKA, DPA dan DPPA	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	80 %	14,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			16,100,000
2	13	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	80 %	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			9,200,000
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kegiatan	80 %	26,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			30,475,000
2	13	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan</b>										2,822,958,832			0
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	2,799,958,832	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,219,952,657
2	13	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ, Penetapan Kinerja	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			17,250,000
2	13	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,450,000
2	13	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,750,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	01	2.03	<b>Administrasi Umum</b>										<b>1,691,872,274</b>			<b>0</b>
2	13	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen dan surat	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,265,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,604,750
2	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	34,655,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			39,853,250
2	13	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kelengkapan kantor yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	12,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13,857,500
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OB yang dibayar honoronya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	372,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			428,605,000
2	13	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata servis peralatan kantor	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,750,000
2	13	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ATK yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	40,333,274	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,383,265
2	13	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar penggandaan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,000,000
2	13	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat listrik yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,025,000
2	13	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,750,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	23,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			27,140,000
2	13	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,500,000
2	13	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	55,410,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63,721,500
2	13	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	255,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			293,250,000
2	13	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			437,000,000
2	13	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23,000,000
2	13	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	71,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			81,650,000
2	13	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah mebeleur yang diadakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	49,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			57,040,000
2	13	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Kegiatan	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			201,250,000
2	13	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Kegiatan	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			8,280,000
2	13	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	9,559,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			10,992,850
2	13	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			115,000,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							<b>134,000,000</b>			<b>0</b>		
2	13	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	88 Stel	100 %	66,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			75,900,000
2	13	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25,300,000
2	13	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Orang	100 %	46,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			52,900,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>							<b>165,000,000</b>			<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>							<b>165,000,000</b>			<b>0</b>		
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi untuk pembentukan Nagari	Jumlah desa yang terfasilitasi untuk pembentukan dan penataan wilayah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	2 Nagari	2 Nagari	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			103,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Nagari	Jumlah desa yang terfasilitasi untuk pembentukan dan penataan wilayah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	2 Nagari	2 Nagari	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			86,250,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>					<b>20,000,000</b>				<b>0</b>			
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>					<b>20,000,000</b>				<b>0</b>			
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Persentase Yang Tertasilatasi Desa dalam Meningkatkan Kerjasama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang terfasilitasi	Jumlah desa/nagari yang difasilitasi dalam meningkatkan kerja sama antar desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 kerjasama	20 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23,000,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>880,000,000</b>				<b>0</b>			
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa</b>					<b>880,000,000</b>				<b>0</b>			
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentasea Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Persentase Jumlah Nagari Yang Menetapkan RKP Tepat waktu	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	79 Nagari 8 Buah 100 %	34 %	153,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			175,950,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu Jumlah nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi Persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nagari yang pendanaanya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI Persentase pembinaan serta pemantauan Dana desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	184 orang 79 Nagari 79 Nagari 75 % 20 %	34 %	347,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			399,050,000
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan penataan administrasi pemerintahan nagari Jumlah Wali Nagari yang mengikuti Rapat Koordinasi/Rapat Kerja	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	15 % 79 orang	34 %	115,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			132,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	0 0	34 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum Nagari yang dievaluasi pada tahun berjalan	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	79 Pernag	34 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	95 %	34 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			51,750,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa/ Wali Nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	18 Nagari	34 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			57,500,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persentase Desa/Nagari yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Cepat Berkembang Terlaksananya evaluasi perkembangan Nagari di 79 Nagari, Status perkembangan Nagari pada 79 Nagari, Terlaksananya lomba Nagari Tk Kab (13 Nagari), Terfasilitasinya lomba Nagari Tk Provinsi (1 Nagari), Terikutinya PINDESKEL Tk Nasional	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	79 Nagari 95 %	34 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			149,500,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>					<b>1,250,000,000</b>				<b>0</b>			
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,250,000,000</b>				<b>0</b>			
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan anggota lembaga adat se-kab Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	1 kegiatan	42 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			34,500,000
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah lembaga yang menerima hibah (LKAAM) Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu Jumlah pembinaan kelompok PKK se-Kab Lima Puluh Kota Jumlah pembinaan lembaga adat dan fasilitasi KKN Jumlah pembinaan PMTAS	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	1 lembaga 549 posyandu 93 kelompok 79 KPM 450 siswa SD	42 %	870,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,000,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah LPM aktif Jumlah nagari yang akan melaksanakan pencaangan BBGRM Jumlah pelaksanaan pelatihan KPMD Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM Jumlah rakor P3MD yang dilaksanakan terkait pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan UU No 6 tentang Desa, serta jumlah pelaksanaan monev lembaga ekonomi pedesaan	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	79 LPM 79 nagari 1 kegiatan 108 kelompok 85 %	42 %	265,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			304,750,000	
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah gelar TTG yang diikuti Jumlah Posyantek yang terbentuk	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	3 kegiatan 9 posyantek	42 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			97,750,000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Lembar 1 dari 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran		32%	859,513,274.00			945,464,600.00	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen dan surat		12 bulan	2,265,000.00		12 bulan	2,491,500.00	
	Jumlah dokumen dan surat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	2,265,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	2,491,500.00	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet		12 Bulan	34,655,000.00		12 Bulan	38,120,500.00	
	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet		DPMD/N	12 Bulan	34,655,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	38,120,500.00	
0.00.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Kelengkapan Kantor yang Diadakan		12 Bulan	12,050,000.00		12 Bulan	13,255,000.00	
	Jumlah kelengkapan kantor yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	12,050,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	13,255,000.00	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB Yang Dibayar Honorinya dan Jumlah Hari Kerja THL yang Dibayarkan		12 Bulan	372,700,000.00		12 Bulan	409,970,000.00	
	Jumlah OB yang dibayar honorinya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan		DPMD/N	12 Bulan	372,700,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	409,970,000.00	
0.00.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata Service Peralatan Kantor		12 Bulan	5,000,000.00		12 Bulan	5,500,000.00	
	Rata-rata servis peralatan kantor		DPMD/N	12 Bulan	5,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	5,500,000.00	
0.00.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Diadakan		12 Bulan	40,333,274.00		12 Bulan	44,366,600.00	
	Jumlah ATK yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	40,333,274.00	APBDKAB	RUTIN OPD	44,366,600.00	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan		12 Bulan	40,000,000.00		12 Bulan	44,000,000.00	
	Jumlah, jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan		DPMD/N	12 Bulan	40,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	44,000,000.00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan		12 Bulan	3,500,000.00			12 Bulan	3,850,000.00
	Jumlah alat listrik yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	3,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		3,850,000.00
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		12 Bulan	5,000,000.00			12 Bulan	5,500,000.00
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	5,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		5,500,000.00
0.00.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		12 Bulan	23,600,000.00			12 Bulan	25,960,000.00
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		DPMD/N	12 Bulan	23,600,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		25,960,000.00
0.00.00.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan		12 Bulan	10,000,000.00			12 Bulan	11,000,000.00
	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		11,000,000.00
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang diadakan		12 Bulan	55,410,000.00			12 Bulan	60,951,000.00
	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang diadakan		DPMD/N	12 Bulan	55,410,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		60,951,000.00
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi		12 Bulan	255,000,000.00			12 Bulan	280,500,000.00
	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi		DPMD/N	12 Bulan	255,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		280,500,000.00
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		43%	832,359,000.00				1,315,160,000.00
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang diadakan		4 unit	380,000,000.00			4 Unit	495,000,000.00
	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diadakan		DPMD/N	1 Unit	380,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		495,000,000.00
0.00.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang diadakan		10 paket	20,000,000.00			10 paket	22,000,000.00
	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang diadakan		DPMD/N	10 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		22,000,000.00
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah laptop, komputer PC, printer		6 paket	71,000,000.00			6 paket	78,100,000.00
	Jumlah laptop, komputer PC, printer		DPMD/N	6 Paket	71,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		78,100,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		4 paket	49,600,000.00			4 paket	54,560,000.00
	Jumlah mebeleur yang diadakan		DPMD/N	4 Paket	49,600,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		54,560,000.00
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor		1 paket	20,000,000.00			1 paket	39,000,000.00
	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor		DPMD/N	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		39,000,000.00
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2		75 kegiatan	175,000,000.00			75 kegiatan	308,000,000.00
	Jumlah kali servis kendaraan roda 2 dan roda 4		DPMD/N	75 Kegiatan	175,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		308,000,000.00
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		10 kegiatan	7,200,000.00			10 kegiatan	33,000,000.00
	Jumlah pekerjaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		DPMD/N	10 Kegiatan	7,200,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		33,000,000.00
0.00.00.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pekerjaan pemeliharaan mebeleur		1 paket	9,559,000.00			1 paket	10,500,000.00
	Jumlah pekerjaan pemeliharaan mebeleur		DPMD/N	1 Paket	9,559,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,500,000.00
0.00.00.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor		1 paket	100,000,000.00			1 paket	275,000,000.00
	Jumlah pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor		DPMD/N	1 Paket	100,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		275,000,000.00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tertaksananya peningkatan disiplin pegawai		48%	66,000,000.00				0.00
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan		50 stel	66,000,000.00			0	0.00
	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan		DPMD/N	110 Stel	66,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		67%	68,000,000.00				74,800,000.00
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat		4 orang	22,000,000.00			4 orang	24,200,000.00
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		DPMD/N	4 Orang	22,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		24,200,000.00
0.00.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK		46 orang	46,000,000.00			50 orang	50,600,000.00
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		DPMD/N	46 Orang	46,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,600,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat perkembangan sistem pelaporan		67%	81,500,000.00				92,150,000.00
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP,SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Adm		10 dokumen	50,000,000.00			11 dokumen	55,000,000.00
	Jumlah dokumen LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Adminitrasi		DPMD/N	10 Dokumen	50,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		55,000,000.00
0.00.00.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		1 dokumen	5,000,000.00			1 dokumen	8,000,000.00
	Jumlah laporan keuangan semesteran		DPMD/N	1 Dokumen	5,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		8,000,000.00
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	26,500,000.00			1 dokumen	29,150,000.00
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		DPMD/N	1 Dokumen	26,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		29,150,000.00
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		35%	810,000,000.00				2,163,502,000.00
1.02.07.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader Posyandu, Pembinaan PMTAS dan fasilitasi KKN		549 posyandu,	120,000,000.00			549 posyandu, 450 siswa SD	132,000,000.00
	Bimbingan Teknis Kader Posyandu		Tanjung Bungo	20 Orang/Kader	1,200,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	pelatihan kader yandu dan lansia ( berlaku untuk semua jorong di nagari piobang)		jorong piobang	30 Orang/Kader	1,800,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Bimbingan teknis bagi kader posyandu		Pauh Sangik	10 Orang/Kader	600,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	pelatihan dan insentif kader posyandu		Nagari Tanjung Pauh	10 Orang/Kader	600,000.00		Prioritas Nasional		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis Kader Posyandu se Nagari Pilubang		Nagari Pilubang	10 Orang/Kader	600,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Pelatihan Kader Kesehatan		Nagari Lubuak Batingkok	15 Orang/Kader	900,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Bimtek kader Posyandu		Nagari Pandam gadang	45 Orang/Kader	2,700,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Bimbingan Teknis Kader Posyandu Ditujukan Untuk Kader Posyandu Nagari Suliki		Nagari Suliki	40 Orang/Kader	2,400,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Kader Pemberdayaan Masyarakat		Nagari Gurun	15 Orang/Kader	900,000.00		Prioritas Nasional		0.00
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu		Kabupaten Lima Puluh Kota	549 Posyandu	93,600,000.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		132,000,000.00
	Jumlah pembinaan PMTAS (pemberian makanan tambahan anak sekolah) siswa SD, fasilitasi KKN		Kabupaten Lima Puluh Kota	450 Orang	0.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
	Bimtek Kader POSYANDU		Nagari Sarilamak kecamatan Harau	45 Orang	2,700,000.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
	Bimbingan teknis kader posyandu		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	100 Orang	6,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
	Pelatihan Kader Posyandu		Kecamatan Gunung Omeh	100 Orang	6,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
1.02.07.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pelatihan KPMD, jumlah kader posyandu yang diberikan Bimtek untuk penanganan stunting, jumlah kader KPM yang diberikan Bimtek		1 kegiatan,	25,000,000.00			1 kegiatan, 549 kader, 79 KPM	168,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jumlah pelaksanaan pelatihan KPMD		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	25,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		168,400,000.00
	Jumlah kader posyandu yang diberikan Bimtek untuk penanganan stunting		Kabupaten Lima Puluh Kota	549 Orang	0.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
	Jumlah kader pembangunan manusia (KPM) yang diberikan Bimtek		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Orang	0.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
<b>1.02.07.15.04</b>	<b>Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>Jumlah gelar TTG yang diikuti</b>		<b>3 kegiatan</b>	<b>85,000,000.00</b>			<b>3 kegiatan</b>	<b>93,500,000.00</b>
	Jumlah gelar TTG yang diikuti		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Kegiatan	85,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		93,500,000.00
<b>1.02.07.15.05</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>	<b>Jumlah LPM aktif</b>		<b>79 LPM</b>	<b>35,000,000.00</b>			<b>79 LPM</b>	<b>267,000,000.00</b>
	Bimbingan Teknis LPM		Tanjung Bungo	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	Bimbingan teknis lembaga pemerdayaan masyarakat (LPM)		Pauh Sangik	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	Bimbingan Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		Nagari Taram	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	BIMTEK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		Sungai Balantiak	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	Bimbingan Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Ditujukan Untuk LPM Nagari Suliki		Nagari Suliki	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	Bintek Pengurus LPM		Suayan	3 Orang	180,000.00		IKU OPD		0.00
	Pemberdayaan lembaga Niniak mamak		Kecamatan Pangkalan Koto baru	18 Orang	1,080,000.00		IKU OPD		0.00
	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) aktif		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Lembaga	32,840,000.00	APBDKAB	IKU OPD		267,000,000.00
<b>1.02.07.15.07</b>	<b>Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)</b>	<b>Jumlah pembinaan kelompok PKK se-Kab Lima Puluh Kota</b>		<b>93 kelompok</b>	<b>350,000,000.00</b>			<b>93 kelompok</b>	<b>500,000,000.00</b>
	Jumlah pembinaan kelompok PKK se Kab-Lima Puluh Kota		Kabupaten Lima Puluh Kota	93 Kelompok	348,740,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		500,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bimtek Pengurus PKK		Nagari Sarilamak kecamatan Harau	7 Orang	420,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		0.00
	Bimtek pengurus PKK		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	14 Orang	840,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		0.00
1.02.07.15.11	<b>Penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari</b>	<b>Persentase nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari dan penetapan batas nagari</b>		<b>53%</b>	<b>90,000,000.00</b>			<b>53%</b>	<b>719,602,000.00</b>
	Persentase Nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari dan penetapan batas Nagari		Kabupaten Lima Puluh Kota	53 %	90,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		719,602,000.00
1.02.07.15.13	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pengembangan nagari</b>	<b>Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari</b>		<b>54%</b>	<b>75,000,000.00</b>			<b>54%</b>	<b>250,000,000.00</b>
	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas Nagari		Kabupaten Lima Puluh Kota	54 %	75,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		250,000,000.00
1.02.07.15.15	<b>Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab.Lima Puluh Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan anggota lembaga adat se-Kab. Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>30,000,000.00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>33,000,000.00</b>
	Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan lembaga adat se-Kab Lima Puluh Kota		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	30,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		33,000,000.00
1.02.07.16.	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>Persentase pelatihan dan fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang dilaksanakan</b>		<b>42%</b>	<b>205,000,000.00</b>				<b>363,800,000.00</b>
1.02.07.16.02	<b>Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa</b>	<b>Persentase badan usaha milik nagari yang aktif</b>		<b>95%</b>	<b>45,000,000.00</b>			<b>95%</b>	<b>49,500,000.00</b>
	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	36,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		49,500,000.00
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Udaha Milik Desa		Kec. Lareh Sago Halaban,Kec. Luak dan Kec.	1 Orang	3,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Situjuh Limo Nagari						
	Bimtek Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa		kecamatan harau dan kecamatan payakumbuh	1 Orang	3,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
	Bimtek		Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Luak, Kec. Situjuh Limo nagari	1 Orang	3,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
1.02.07.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rakor P3MD yang dilaksanakan dan jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga-lembaga ekonomi pedesaan		2 kali	30,000,000.00			2 kali	171,300,000.00
	Jumlah rakor P3MD yang dilaksanakan terkait pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa, serta jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga-lembaga ekonomi pedesaan		Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Kali	30,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		171,300,000.00
1.02.07.16.15	Perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah nagari dengan status berkembang dan cepat berkembang		79 nagari	130,000,000.00			79 nagari	143,000,000.00
	Jumlah nagari dengan status berkembang dan cepat berkembang		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	130,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		143,000,000.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase nagari dengan status berkembang dan maju		95%	393,000,000.00				803,935,000.00
1.02.07.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah pencanangan BBGRM yang dilaksanakan, dan terlaksananya pembukaan dan penutupan TMMN		2 kegiatan	150,000,000.00			2 kegiatan	165,000,000.00
	Jumlah pencanangan BBGRM yang dilaksanakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	150,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		165,000,000.00
	Terlaksananya pembukaan dan penutupan TMMN		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	0.00	APBDKAB	Prioritas Nasional		0.00
1.02.07.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Persentase nagari yang menetapkan RKP tepat waktu		100%	53,000,000.00			100%	181,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Persentase jumlah Nagari yang menetapkan RKP tepat waktu		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	53,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		181,500,000.00
<b>1.02.07.17.03</b>	<b>Pemberian stimulan pembangunan desa</b>	<b>Persentase pembinaan serta pemantauan dana desa</b>		<b>20%</b>	<b>80,000,000.00</b>			<b>20%</b>	<b>88,000,000.00</b>
	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa		Kabupaten Lima Puluh Kota	20 %	80,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		88,000,000.00
<b>1.02.07.17.04</b>	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nagari yang pendanaannya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa sesuai perjanjian kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI</b>		<b>75%</b>	<b>85,000,000.00</b>			<b>75%</b>	<b>93,500,000.00</b>
	Persentase pelaksanaan koordinasi, monev program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Nagari yang pendanaannya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian kerja sama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI		Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	85,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		93,500,000.00
<b>1.02.07.17.05</b>	<b>Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari</b>	<b>Persentase nagari dengan status berkembang dan maju, persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada</b>		<b>96%</b>	<b>0.00</b>			<b>96%</b>	<b>182,435,000.00</b>
	Persentase Nagari dengan status berkembang dan maju, persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada		Kabupaten Lima Puluh Kota	96 %	0.00	APBDKAB	IKU Daerah		182,435,000.00
<b>1.02.07.17.06</b>	<b>Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-Fasum)</b>	<b>Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan monev kelembagaan KPP-Fasum</b>		<b>108 kelompok</b>	<b>25,000,000.00</b>			<b>108 kelompok</b>	<b>93,500,000.00</b>
	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan Monev kelembagaan KPP-FASUM		Kabupaten Lima Puluh Kota	108 Kelompok	25,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		93,500,000.00
<b>1.02.07.18.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah</b>		<b>37%</b>	<b>252,000,000.00</b>				<b>429,000,000.00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	desa	desa							
1.02.07.18.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah peserta Bimtek pengelola kawasan perdesaan		60 orang	20,000,000.00			60 orang	93,500,000.00
	Jumlah peserta Bimtek pengelola kawasan perdesaan		Kabupaten Lima Puluh Kota	60 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		93,500,000.00
1.02.07.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari		184 orang	67,000,000.00			184 orang	99,000,000.00
	Jumlah aparatur pemerintahan Nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan Nagari		Kabupaten Lima Puluh Kota	184 Orang	67,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		99,000,000.00
1.02.07.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti bimtek manajemen pemerintahan nagari (perangkat nagari dan Bamus)		22%	115,000,000.00			22%	126,500,000.00
	Jumlah aparatur pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek Manajemen Pemerintahan Nagari (Perangkat Nagari dan Bamus)		Kabupaten Lima Puluh Kota	22 %	115,000,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		126,500,000.00
1.02.07.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Nagari yang termonitor dalam pelaksanaan pemerintahan nagari		100%	15,000,000.00			100%	55,000,000.00
	Jumlah Nagari yang termonitor dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	15,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		55,000,000.00
1.02.07.18.06	Rapat koordinasi dan rapat kerja Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti Rapat Koordinasi/Rapat Kerja		100%	35,000,000.00			100%	55,000,000.00
	Jumlah wali Nagari yang mengikuti rapat koordinasi/rapat kerja		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	35,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		55,000,000.00
1.02.07.20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari		34%	215,000,000.00				236,500,000.00
1.02.07.20.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di Kecamatan		79 nagari	50,000,000.00			79 nagari	55,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jumlah evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	50,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		55,000,000.00
1.02.07.20.03	<b>Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa</b>	<b>Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati</b>		<b>8 (Perbup dan</b>	<b>50,000,000.00</b>			<b>8 (Perbup dan Keputusan)</b>	<b>55,000,000.00</b>
	Jumlah pedoman dan regulasi Nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati		Kabupaten Lima Puluh Kota	8 Peraturan	50,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		55,000,000.00
1.02.07.20.04	<b>Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa</b>	<b>Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu</b>		<b>79 nagari</b>	<b>50,000,000.00</b>			<b>79 nagari</b>	<b>55,000,000.00</b>
	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	50,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		55,000,000.00
1.02.07.20.05	<b>Bimbingan Teknis pengelolaan aset dan kekayaan Nagari</b>	<b>Jumlah nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi</b>		<b>79 nagari</b>	<b>65,000,000.00</b>			<b>79 nagari</b>	<b>71,500,000.00</b>
	Jumlah Nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan Nagari berbasis aplikasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	65,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		71,500,000.00
4.00.01.26.	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase peraturan perundangan Kabupaten untuk Nagari yang dilaksanakan / disusun</b>		<b>20%</b>	<b>40,000,000.00</b>				<b>44,000,000.00</b>
4.00.01.26.19	<b>Fasilitasi penyusunan produk hukum Nagari skala Kabupaten dan Nagari</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh Nagari (wajib dan diluar yang wajib)</b>		<b>45%</b>	<b>40,000,000.00</b>			<b>45%</b>	<b>44,000,000.00</b>
	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh Nagari (wajib dan diluar yang wajib)		Kabupaten Lima Puluh Kota	45 %	40,000,000.00	APBDKAB	Lainnya		44,000,000.00
<b>Total</b>						3,822,372,274.00			<b>6,468,311,600.00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 112 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Tahun 2016-2021. Renja ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun lalu, permasalahan serta rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Tahun 2021.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, sebagai pedoman dan dapat meningkatkan kinerja DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021.

Ditetapkan di           :     Payakumbuh  
Pada Tanggal            :     Agustus 2020

**KEPALA DPMD/N  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Drs. A. Zuhdi Perama. P, M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004